

PENILAIAN PERFORMA KEUANGAN DAERAH SERTA EFEKTIVITAS PAJAK KOTA SURABAYA TAHUN 2019-2023

Tri Rahmawati
rhahrahma17@gmail.com
Riska Amellia Putri
riskamelliaaaa3@gmail.com
Vicki Meilia Dwi Firnanda
Mega Tunjung Hapsari
Cahaya Riana
Sandy Yudha Anggara Lhoksa
Rifqi Liwaunnasri Armanda Saputra

Abstract

The performance assessment of a region's revenue and expenditure aims to determine the region's ability to manage finances and take responsibility for implementing regional autonomy. The research objective is to assess financial and tax performance by calculating financial ratios for 2019-2023. This research uses a descriptive quantitative approach with secondary data obtained from the Central Statistics Agency and the Ministry of Finance website. The results of the financial independence ratio for the City of Surabaya are 40.78% with low criteria and a consultative relationship pattern. The degree of decentralization ratio reached 58.68%, which shows very good criteria for financing regional government activities. The PAD effectiveness ratio is 88.16%, which means it is still not optimal in achieving targets. The BOTB ratio is 82.52%, which means that expenditure on operational activities is still dominant. Meanwhile, the BMTB ratio of 19.79% indicates a relatively good capital expenditure allocation. The direct spending ratio is higher than the indirect spending ratio, namely 70.54% and 29.45%, which shows that direct spending on public services is higher than indirect spending. And tax effectiveness is 86.95% with a rating of less effective.

Keywords: Regional Financial Performance, City of Surabaya, Financial Ratios

Abstrak

Penilaian kinerja penerimaan dan pengeluaran suatu daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengelola keuangan dan sebagai tanggung jawab dalam pelaksanaan otonomi daerah. Tujuan penelitian untuk menilai performa keuangan serta pajak dengan perhitungan rasio keuangan tahun 2019-2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan data sekunder yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik dan website Kementerian Keuangan. Hasil rasio kemandirian keuangan Kota Surabaya yaitu 40,78% dengan kriteria rendah dan pola hubungan konsultif. Rasio derajat desentralisasi mencapai 58,68% yang menunjukkan kriteria sangat baik dalam pembiayaan kegiatan pemerintah daerah. Rasio efektivitas PAD sebesar 88,16% yang berarti masih belum optimal dalam mencapai sasaran. Rasio BOTB sebesar 82,52% yang berarti pengeluaran untuk kegiatan operasional masih dominan. Sementara itu, rasio BMTB sebesar 19,79% menunjukkan alokasi belanja modal relatif baik. Rasio belanja langsung lebih tinggi dibandingkan rasio belanja tidak langsung, yakni 70,54% dan 29,45%, yang menunjukkan bahwa pengeluaran langsung untuk pelayanan publik lebih tinggi dari pengeluaran tidak langsung. Dan efektivitas pajak sebesar 86,95% dengan penilaian kurang efektif.

Kata kunci: Kinerja Keuangan Daerah, Kota Surabaya, Rasio Keuangan

PENDAHULUAN

Kota Surabaya sebagai ibu kota sekaligus menjadi salah satu Kota terbesar dalam provinsi Jawa Timur. Kontribusi yang akan diberikan juga akan besar sebagai penunjang perekonomian di Indonesia. Dalam kegiatannya sebagai pusat ekonomi dan bisnis di Jawa Timur, Kota Surabaya memiliki jumlah penduduk yang pesat dan pembangunan infrastruktur yang masih turut mempengaruhi kinerja keuangan daerah. Semakin bertambahnya penduduk dan kegiatan perekonomian, Kota Surabaya menghadapi tantangan dalam melakukan pengelolaan maupun pelaksanaan kegiatan pemerintah yang mengarah pada terlaksananya otonomi daerah. Pengukuran kinerja keuangan penting untuk melihat perkembangan pendapatan serta pengeluaran daerah dalam periode tertentu (Prasasyaningsih & Rohos, 2023). Bentuk kemandirian daerah dapat mencerminkan performa pemerintah dalam mengelola keuangan dari kegiatan otonomi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah sendiri tercatat sejak tahun 1974 yang telah termuat dalam aturan tentang otonomi daerah. Undang-Undang telah mengalami pergantian sejak tahun 1998 yang pada akhirnya perubahan terakhir pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 terkait sistem pelaksanaan pemerintahan daerah (Amin, 2017). Terkait adanya peraturan perundang-undangan tersebut pemerintah daerah mempunyai kewenangan penuh dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan (Andrianus, Hijriah, & Astarani, 2024). Kebijakan yang ditetapkan dimaksudkan untuk memberikan kendali kepada pemerintah daerah atas potensi yang mereka miliki.

Penilaian keuangan dalam kegiatan otonomi daerah yang paling dominan terletak pada hasil penerimaan dan pengeluaran daerah serta pajak yang sudah terlaksana dalam pemerintahan Kota Surabaya. Penilaian dengan menggunakan perhitungan rasio keuangan akan menggambarkan kualitas keunggulan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah (Asyifyan, 2024). Dalam mencapai kemampuan daerah tersebut, Pemerintah Kota Surabaya harus melakukan pengelolaan keuangan terutama anggaran pendapatan dan belanja secara bertanggung jawab dan sesuai aturan pemda. Dengan adanya keuangan yang jelas dan informatif akan menggambarkan bahwa suatu daerah tersebut

mempunyai kinerja keuangan yang bagus sehingga daerah tersebut dinilai mampu dalam membiayai kegiatan pemerintahannya.

Dari pendahuluan di atas penelitian ini bertujuan menilai performa keuangan daerah dan efektivitas pajak Kota Surabaya tahun 2019-2023. Bertujuan untuk mengisi kesenjangan penelitian (Rachmawati & Handayani, 2023) terkait kinerja keuangan daerah Kota Surabaya dengan menambahkan variabel rasio keuangan yang berkaitan dengan belanja daerah serta pajak. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat memberikan dedikasi baru terkait pemaparan kondisi keuangan daerah di Kota Surabaya.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan seluruh bentuk kewenangan dan tanggung jawab yang berkaitan dengan otonomi daerah dan dapat dinyatakan dalam bentuk uang. Keuangan selalu menjadi masalah utama dalam upaya mengelola kebijakan suatu daerah. Tanpa adanya pengeluaran yang cukup suatu daerah tidak akan dapat melaksanakan kegiatannya secara optimal dan tepat dalam pembangunan dan pelayanan publik. Pendapatan asli daerah dari hasil pelaksanaan dan pajak dari berbagai pemerolehan menggambarkan kemampuan keuangan daerah (Hafyani, Sintia, & Jatmiko, 2023). Selain itu, hasil dari pendapatan yang lainnya yang dimiliki daerah juga dapat menentukan tingkat kemampuan daerah. Tingkat pendapatan yang diperoleh masing-masing daerah berbeda sesuai dengan keadaan kemampuan daerah, kekayaan alam, padatnya penduduk serta keadaan wilayah yang mempengaruhinya. Keuangan daerah yang dikelola dengan baik akan menggambarkan kondisi keuangan daerah tersebut optimal dan efisien (Marsella & Nugroho, 2024). Keuangan daerah dapat digambarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat dinilai melalui perhitungan rasio keuangan daerah (Rahil, Widodo, & Nuraeni, 2024).

Rasio Kemandirian Keuangan

Rasio ini menunjukkan seberapa bergantungnya daerah pada sumber dana pihak luar. Dengan penilaian jika rasio kemandirian tinggi maka ketergantungan daerah pada pihak luar (terutama dari pemerintah pusat dan provinsi) akan rendah. Namun jika tingkat rasio kemandirian rendah, maka tingkat bantuan pada pihak luar akan semakin tinggi (Hidayatullah, Kusuma, & Susandra, 2024). Rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$KK = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi dan pinjaman}} \times 100\%$$

Hubungan situasional dalam rasio kemandirian keuangan:

- 0% - 25% berarti kinerja rendah sekali, termasuk pola hubungan instrutif
- 25% - 50% berarti kinerja rendah, termasuk pola hubungan konsultif
- 50% - 75% berarti kinerja sedang, termasuk pola hubungan partisipatif
- 75% - 100% berarti kinerja tinggi, termasuk pola hubungan delegatif

Rasio Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi sebuah indikator untuk menilai kemampuan daerah dalam mendanai kegiatan pemerintahannya melalui optimalisasi PAD. Perhitungan sebagai berikut:

$$DD = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tingkat penilaian:

- Persentase 0% - 10%, kinerja sangat kurang
- Persentase 10,01 – 20%, kinerja kurang
- Persentase 20,01% - 30%, kinerja cukup
- Persentase 30.01% - 40%, kinerja sedang
- Persentase 40,01% - 50%, kinerja baik
- Persentase >50%, kinerja sangat baik

Rasio Efektivitas PAD

Yaitu pengukuran keunggulan suatu pemerintah daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah yang sudah ditetapkan dalam bentuk anggaran. Rasio ini dihitung dari besarnya realisasi penerimaan asli daerah dalam mencapai sasaran yang sebaiknya dicapai pada periode tertentu. Rumus perhitungan:

$$\text{Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Anggaran Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Penilaian efektivitas dalam PAD:

- > 100%, berarti kinerja sangat efektif
- 100%, berarti kinerja efektif
- 90% - 99%, berarti kinerja cukup efektif
- 75% - 89%, berarti kinerja kurang efektif
- < 75%, berarti kinerja tidak efektif

Rasio Belanja Operasional Daerah

Merupakan salah satu jenis belanja yang dikeluarkan dengan tujuan aktivitas sehari-hari daerah serta memberikan keuntungan dalam waktu yang pendek. Belanja yang termasuk dalam kategori ini yaitu belanja barang, jasa, hibah, pegawai, dan operasional lainnya. Rumus perhitungan:

$$\text{Rasio BOTB} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasional}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian:

Besaran Persentase	Penilaian Belanja
$\geq 90\%$	Baik
$\leq 90\%$	Kurang Baik

Rasio Belanja Modal

Salah satu jenis belanja daerah yang digunakan untuk membeli aktiva atau meningkatkan nilai aktiva tetap maupun aktiva lainnya yang memberi keuntungan selama lebih dari satu periode akuntansi dan melampaui batas minimal kapitalisasi aktiva tetap maupun aktiva lainnya sesuai ketentuan pemerintah. Perhitungan rasio sebagai berikut:

$$\text{Rasio BMTB} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Dengan penilaian kriteria sebagai berikut:

Jika persentase yang dihasilkan $> 5\%$, maka kinerja belanja baik

Jika persentase yang dihasilkan $< 5\%$, maka kinerja belanja kurang baik

Rasio Belanja Secara Langsung (BL) dan Tidak Langsung (BTL)

Belanja langsung sebagai biaya yang berkaitan secara langsung terhadap implementasi aktivitas yang telah ditetapkan. Sedangkan belanja tidak langsung sebagai biaya yang berkaitan secara tidak langsung terhadap implementasi aktivitas yang telah ditetapkan daerah. Rumus perhitungan rasio BL dan BTL:

$$\text{Belanja Langsung} = \frac{\text{Jumlah Belanja Langsung}}{\text{Jumlah Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Belanja Tidak Langsung} = \frac{\text{Jumlah Belanja Tidak Langsung}}{\text{Jumlah Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Penilaian rasio:

Jika persentase belanja langsung > belanja tidak langsung, maka penilaian dari belanja langsung bernilai baik.

Jika persentase belanja langsung < belanja tidak langsung, maka penilaian belanja langsung bernilai kurang baik (Selvi & Hapsari, 2023).

Rasio Efektivitas Pajak

Rasio ini menilai keunggulan wilayah dalam menghimpun pajak berdasarkan sasaran yang telah ditentukan. Rasio ini dihitung dari besarnya realisasi pendapatan pajak dalam memperoleh sasaran yang sebaiknya didapatkan pada periode tertentu (Hapsari, 2022). Rumus perhitungan rasio efektivitas pajak:

$$\text{Rasio Efektivitas Pajak} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Kategori penilaian efektivitas pajak:

- > 100%, berarti kinerja sangat efektif
- 100%, berarti kinerja efektif
- 90% - 99%, berarti kinerja cukup efektif
- 75% - 89%, berarti kinerja kurang efektif
- < 75%, berarti kinerja tidak efektif

METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian ini deskriptif kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini. Kuantitatif termasuk jenis penelitiannya sedangkan deskriptif mengindikasikan teknik analisis datanya . Dengan

demikian penelitian deskriptif kuantitatif merupakan teknik analisa data dengan metode menafsirkan data yang telah terhimpun tanpa bermaksud menghasilkan kesimpulan yang berlangsung secara umum atau meluas. Dalam penilaian keuangan daerah menerapkan rumus perhitungan rasio keuangan daerah yang dihasilkan dalam bentuk persentase untuk menilai performa keuangan Kota Surabaya.

Data yang dipakai dalam penelitian ini tergolong dalam data sekunder yaitu sudah diolah dan didokumentasikan. Data dalam penelitian bersumber melalui Kota Surabaya dalam angka tahun 2019-2023 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistika (BPS) serta dari website djpk Kemenkeu yang berisi portal data APBD. Data yang dikumpulkan oleh peneliti berupa kumpulan informasi mengenai realisasi pendapatan dan belanja pemerintah Kota Surabaya serta anggaran dan realiasi pajak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Perhitungan Rasio

Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan

Tabel 1. Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Kota Surabaya Tahun 2019-2023.

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Bantuan Pemerintahan dan Pinjaman	KK (%)	Kinerja
2019	5.381.915.070	1.381.905.123	38,94%	Rendah
2020	4.289.960.292	1.209.975.039	35,45%	Rendah
2021	4.727.280.630	1.397.061.414	33,83%	Rendah
2022	5.314.695.258	960.320.839	55,34%	Sedang
2023	5.771.896.714	1.431.052.830	40,33%	Rendah
Rata-rata	5.097.149.593	1.276.063.049	40,78%	Rendah

Sumber: Kota Surabaya Dalam Angka Tahun 2019-2023

Dari data di atas menunjukkan bahwa perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Kota Surabaya mencapai persentase di atas 30% selama 5 tahun berturut-turut. Dari tahun 2019-2021 mengalami penurunan, tahun 2019 sebesar 38,94% mengalami penurunan kembali di tahun 2020

sebesar 35,45% dan 2021 33,83%. Namun di tahun 2022 pasca adanya COVID-19 mengalami kenaikan yang cukup baik sebesar 53,34% dengan kinerja sedang. Selanjutnya di tahun 2023 justru menurun kembali sebesar 40,33% tetapi tidak serendah di tahun sebelumnya. Dengan demikian rata-rata menunjukkan bahwa rasio kemandirian sebesar 40,78% kinerjanya rendah dengan pola hubungan konsultif. Dengan arti tingkat kemandirian keuangan Kota Surabaya sedikit kompeten dalam menjalankan sistem otonomi daerah.

Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi

Tabel 2. Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Kota Surabaya Tahun 2019-2023.

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pendapatan (Rp)	Derajat Desentralisasi	Kinerja
2019	5.381.915.070	8.765.147.837	61,40%	Sangat baik
2020	4.289.960.292	7.545.416.994	56,85%	Sangat baik
2021	4.727.280.630	8.278.680.473	54,15%	Sangat baik
2022	5.314.695.258	8.750.171.977	60,73%	Sangat baik
2023	5.771.896.714	9.574.334.225	60,28%	Sangat baik
Rata-rata	5.097.149.593	8.582.750.301	58,68%	Sangat baik

Sumber: Kota Surabaya Dalam Angka Tahun 2019-2023

Dari tabel di atas perhitungan menunjukkan selama periode 2019-2023 kinerja derajat desentralisasi sangat baik. Di tahun 2019 persentase sebesar 61,40%, terjadi penurunan pada tahun 2020 dan 2021 sebesar 56,85% dan 54,15%. Namun di tahun berikutnya tahun 2022 mengalami kenaikan kembali yang baik dengan persentase 60,73% dan di tahun berikutnya menurun sedikit sebesar 60,28%. Dari perhitungan menunjukkan rata-rata 58,68% dengan kinerja yang sangat baik. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan asli daerah Kota Surabaya mempunyai kontribusi yang luar biasa dalam menunjang penghasilan daerah.

Perhitungan Rasio Efektivitas PAD

Tabel 3. Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Kota Surabaya Tahun 2019-2023.

Tahun	Anggaran PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Efektivitas	Penilaian
2019	5.190.300.000	5.381.915.070	103,69%	Sangat efektif
2020	5.584.630.000	4.289.960.292	76,81%	Kurang efektif
2021	5.561.560.000	4.727.280.630	85,00%	Kurang efektif
2022	6.058.970.000	5.314.695.258	87,72%	Kurang efektif
2023	6.592.420.000	5.771.896.714	87,55%	Kurang efektif
Rata-rata	5.797.576.000	5.097.149.593	88,16%	Kurang efektif

Sumber: Kota Surabaya Dalam Angka Tahun 2019-2023

Dari perhitungan rasio di atas menunjukkan selama 5 tahun mengalami fluktuasi. Tahun 2019 perhitungan menunjukkan persentase 103,69% di mana kinerja pajak sangat efektif. Namun tahun selanjutnya 2020-2023 efektivitas pajak mengalami penurunan dengan persentase dibawah 90% sehingga semua kinerja kurang efektif. Perhitungan rata-rata menunjukkan 88,16% dengan kinerja pajak kurang efektif. Dengan demikian kinerja PAD Kota Surabaya masih belum optimal di mana realisasi penerimaan selalu di bawah target penerimaan yang telah ditentukan.

Perhitungan Rasio Belanja Operasional (BOTB)

Tabel 4. Perhitungan Rasio BOTB Kota Surabaya Tahun 2019-2023.

Tahun	Pengeluaran Operasional (Rp)	Keseluruhan Belanja	BOTB (%)	Penilaian Belanja
2019	6.404.509.217	9.164.382.273	69,88%	Baik
2020	7.430.411.986	8.032.680.988	92,50%	Kurang Baik
2021	6.771.433.976	7.816.021.887	86,63%	Baik

2022	7.679.441.144	9.447.174.190	81,28%	Baik
2023	7.858.876.843	9.543.560.903	82,34%	Baik
Rata-rata	7.228.934.633	8.800.764.048	82,52%	Baik

Sumber: Kota Surabaya Dalam Angka Tahun 2019-2023

Dari perhitungan rasio di atas dapat diartikan belanja operasional Kota Surabaya tahun 2019 sebesar 69,88% yang berarti di bawah 90%. Tahun 2020 saat Covid-19 mengalami kenaikan dengan persentase 92,50% yang di mana prosentase tersebut di atas 90% yang memiliki indikasi kurang baik. Tahun 2021-2023 mengalami penurunan kembali dengan kinerja baik. Hasil keseluruhan menunjukkan rata-rata 82,52% kurang dari 90% sehingga memiliki kinerja baik. Dengan hasil perhitungan tersebut alokasi belanja operasional Kota Surabaya cenderung stabil.

Perhitungan Rasio Belanja Modal (BMTB)

Tabel 5. Perhitungan Rasio Belanja Modal Kota Surabaya Tahun 2019-2023.

Periode	Belanja Modal (Rp)	Total Belanja (Rp)	BMTB (%)	Performa
2019	2.754.304.824	9.164.382.273	30,05%	Baik
2020	1.583.663.160	8.032.680.988	19,71%	Baik
2021	1.016.336.503	7.816.021.887	13,00%	Baik
2022	1.766.030.467	9.447.174.190	18,69%	Baik
2023	1.671.868.284	9.543.560.903	17,51%	Baik
Rata-rata	1.758.440.648	8.800.764.048	19,79%	Baik

Sumber: Kota Surabaya Dalam Angka Tahun 2019-2023

Berdasarkan perhitungan rasio di atas menunjukkan selama periode 2019-2023 belanja modal berada pada tingkat yang baik. Terjadi penurunan yang sangat drastis dari 30,05%, menurun 19,71% dan tahun 2021 menurun lagi 13,00%. Tahun berikutnya rasio belanja modal mulai berfluktuasi namun tidak signifikan, meningkat menjadi 18,69% pada tahun 2022, dan menurun kembali di tahun 2023

menjadi 17,51%. Perhitungan rata-rata memperlihatkan kinerja yang baik selama 5 tahun dengan persentase sebesar 19,79% yang pasti melebihi 5%.

Perhitungan Rasio Belanja Secara Langsung dan Tidak Langsung

Tabel 6. Perhitungan Rasio Belanja Langsung dan Tidak Langsung Kota Surabaya Tahun 2019-2023.

Tahun	Belanja Langsung (Rp)	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Total Belanja (Rp)	Persentase BL	Persentase BTL	Kinerja
2019	6.993.391.116	2.170.991.157	9.164.382.273	76,31%	23,68%	Baik
2020	5.608.863.727	2.423.817.261	8.032.680.988	69,82%	30,17%	Baik
2021	5.276.301.569	2.539.720.317	7.816.021.887	67,50%	32,49%	Baik
2022	6.658.092.557	2.789.081.633	9.447.174.190	70,47%	29,52%	Baik
2023	6.507.797.455	3.035.763.448	9.543.560.903	68,19%	31,80%	Baik
Rata-Rata	6.208.889.285	2.591.874.763	8.800.764.048	70,54%	29,45%	Baik

Sumber: Kota Surabaya Dalam Angka Tahun 2019-2023

Dari perhitungan rasio di atas penilaian belanja langsung dan tidak langsung periode 5 tahun memiliki rata-rata kinerja yang baik dengan persentase nilai belanja langsung lebih dari persentase belanja secara tidak langsung. Perhitungan rata-rata belanja secara langsung menunjukkan persentase 70,54% yang di mana nilai tersebut di atas belanja tidak langsung yaitu 29,45%. Dari rata-rata tersebut berarti pengalokasian lebih terpusat pada pelaksanaan belanja langsung daerah.

Perhitungan Rasio Efektivitas Pajak

Tabel 7. Perhitungan Rasio Efektivitas Pajak Kota Surabaya Tahun 2019-2023.

Tahun	Pajak Daerah		Rasio Efektivitas	Kinerja
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
2019	4.008.790.000	4.018.720.000	100,24%	Efektif
2020	4.313.470.000	3.277.050.000	75,97%	Kurang Efektif
2021	4.442.980.000	3.649.730.000	82,14%	Kurang Efektif
2022	4.768.250.000	4.157.520.000	87,18%	Kurang Efektif
2023	5.112.150.000	4.562.880.000	89,24%	Kurang Efektif
	Rata-rata		86,95%	Kurang Efektif

Sumber: Website kemenkeu data APBD Kota Surabaya Tahun 2019-2023

Dari perhitungan rasio efektivitas pajak Kota Surabaya selama 5 tahun mengalami fluktuasi. Tahun 2019 perhitungan menunjukkan persentase 100,24% di mana kinerja pajak efektif. Namun tahun selanjutnya 2020-2023 efektivitas pajak mengalami penurunan dengan persentase dibawah 90% sehingga semua kinerja kurang efektif. Perhitungan rata-rata menunjukkan 86,95% dengan kinerja pajak kurang efektif. Dengan demikian kinerja pajak Kota Surabaya masih belum optimal di mana realisasi pajak selalu di bawah target pajak yang telah ditentukan.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan penelitian, hasil kesimpulan melalui perhitungan rata-rata rasio keuangan untuk menilai performa keuangan daerah serta pajak Kota Surabaya Tahun 2019-2023 menunjukkan; dari segi kemandirian keuangan persentase 40,78% kinerjanya rendah dengan relationship bersifat konsultif. Dengan penilaian sedikit mampu dalam pelaksanaan dan masih mengandalkan bantuan pihak eksternal. Derajat desentralisasi persentase 58,68% dengan kinerja yang sangat baik, dalam artian Kota Surabaya memiliki derajat desentralisasi yang cukup tinggi sehingga menunjukkan kemampuan yang baik dalam mengelola keuangan daerah. Efektivitas penerimaan asli daerah menunjukkan persentase 88,16% dinilai masih belum optimal dalam mencapai sasaran. Belanja operasional menunjukkan 82,52% yang di mana rasio kurang dari 90% sehingga kinerja baik. Belanja modal memiliki kinerja baik dengan persentase 19,79%, di mana melebihi 5%. Dari belanja langsung

persentase sebesar 70,54% yang di mana itu lebih besar dari pada nilai belanja secara tidak langsung senilai 29,45%. Dari efektivitas pajak mengindikasikan bahwa kinerja pajak kurang efektif dengan perolehan 86,95%. Dengan demikian kinerja pajak belum optimal dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Analisis penelitian menggunakan data dalam rentang waktu 5 tahun. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif perlu dilakukan analisis dengan data yang lebih panjang. Rasio perhitungan yang digunakan masih ada beberapa yang belum dinilai, untuk peneliti di kemudian hari dapat mencantumkan variabel rasio yang lebih banyak agar mendapatkan gambaran kondisi keuangan daerah yang lebih jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. (2017). *Memahami Keuangan Daerah*. Sidoarjo: Indomedia Pustaka.
- Andrianus, A., Hijriah, A., & Astarani, J. (2024). Analisis Kinerja Finansial Pemerintah Kabupaten Sekadau Periode 2019-2022. *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi dan Akuntansi)*, 13 (2), 493-499.
- Asyifyan, M. A. (2024). Kinerja Keuangan Pemerintah Kota di Jawa Timur. *JAE (Jurnal Akuntansi dan Ekonomi)*, 9 (2), 106-115.
- Hafyani, Y., Sintia, S., & Jatmiko, R. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19. *Jupiman (Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen)*, 2(3), 112-124.
- Hapsari, M. T. (2022). Kinerja Pajak Daerah Kabupaten Tulungagung Ditinjau Dari Analisis Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Serta Perspektif Ekonomi Islam. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(2).
- Hidayatullah, A., Kusuma, I. C., & Susandra, F. (2024). Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2016-2020. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 3781-3795.
- Idris, M. P. (2017). *Kinerja Keuangan Daerah*. Makassar: De La Macca.
- Marsella, D., & Nugroho, A. A. (2024). Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah/Kota Penerima Opini WTP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Periode 2018-2022. *Indonesian Journal of Economics, Management, and Accounting*, 1(6), 471-481.
- Permana, D., Telaumbanua, S., & Simanjuntak, E. (2024). Analisis Rasio Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2016-2022. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(4), 45-53.
- Prasasyaningsih, X. I., & Rohos, Y. P. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia: Studi Kasus di Lima Kabupaten/Kota. *Prosiding Seminar Nasional Forum Manajemen Indonesia*, 320-333.

- Prasasyaningsih, X. I., & Rohos, Y. P. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia: Studi Kasus di Lima Kabupaten/Kota. *Prosiding Seminar Nasional Forum Manajemen Indonesia-e-ISSN 3026-4499*, Vol. 1, pp. 320-333.
- Rachmawati, T., & Handayani, N. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 12(11).
- Rahil, R., Widodo, D. P., & Nuraeni, Y. S. (2024). Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Efisiensi Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Periode 2018-2023. *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 12(1), 1-9.
- Selvi, N. M., & Hapsari, M. T. (2023). Kinerja Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Sebelum, Saat, dan Pasca Pandemi COVID-19 (Tahun 2017-2022). *JAKA (Jurnal AKuntansi, Keuangan, dan Auditing)*, 4(1), 205-214.
- Wulandari, R., Lestari, B. A., & Suryantara, A. B. (2023). Analisis Rasio Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Jurnal Riset Mahasiswa dan Akuntansi*, 3(2), 56-69.